



LAPORAN

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

LAPORAN PENGELOLAAN

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG**

DAFTAR ISI

I.	SDM DAN ORGANISASI.....	1
a.	Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH.....	1
b.	Susunan Pengelola JDIH.....	7
c.	Keputusan Tim Pengelola JDIH.....	9
d.	Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH.....	9
II.	TEKNIS PENGELOLAAN.....	9
a.	Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum.....	9
b.	Kesesuaian Dokumen yang Diunggah.....	10
c.	Tata Cara Pengunggahan Dokumen Hukum.....	11
d.	Abstrak pada Produk Hukum yang diunggah.....	11
III.	SARANA PRASARANA.....	12
a.	Ruang Khusus JDIH.....	12
b.	Ruang kerja JDIH.....	13
IV.	PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA.....	15
V.	DOKUMENTASI HUKUM.....	17
VI.	SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU.....	18
VII.	SARAN DAN MASUKAN.....	19

SDM DAN ORGANISASI

a. Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan tepat (PM Kominfo No. 20 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kominfo).

Dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 tanggal 01 Juni 2024. Keputusan tersebut berlaku hingga saat ini dikarenakan tidak terdapat perubahan struktur terkait tim pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Berikut dokumentasi Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 dalam bentuk scan sebagai berikut:



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Semarang;

- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG;

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - f. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - g. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - h. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 - j. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;
- KELIMA : Pada saat ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 054/HK.01.01/K.JT-23/10/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat

b. Susunan Pengelola JDIH

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang telah membuat susunan Tim Anggota terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor : 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024 Tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tertanggal 01 Juni 2024 yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai berikut:

Dokumentasi lampiran susunan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024
TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEMARANG

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina	:	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang
Penanggung jawab	:	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang
Anggota	:	1. Muhamad Budi Purwanto 2. Noor Muhammad Nasyar 3. Sony Surya Prayoga 4. Andi Setiawan

Ditetapkan di : Ungaran
pada tanggal : 01 Juni 2024

KETUA,

AGUS RIFANTO, SP.,SH.

c. Keputusan Tim Pengelola JDIH

Surat Keputusan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang yang diunggah di JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang telah mengunggah Surat Keputusan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang terdapat di JDIH Bawaslu ke JDIH Bawaslu dengan tautan dan bukti tangkapan layar akun JDIH sebagai berikut.

Gambar front-end JDIH Bawaslu

The screenshot displays the JDIH BAWASLU web application. The header includes the logo and name 'semarangkab' with an 'Online' status. The main navigation menu on the left lists: Beranda, Peraturan Pusat, Produk Hukum, Putusan, Bahan Awal Ket. Tertulis PHPU, and Monografi. The top bar shows the document ID 'sk-054/hk.01.01/k.jt-23/06/2024-2024'. Below this are action buttons: Kembali, Ubah, Relasi, Peraturan Terkait, Dokumen Terkait, and Hapus. The 'Detail' tab is selected, showing a table of decision metadata.

Detail	Relasi	Peraturan Terkait	Dokumen Terkait	Aktifitas User	Verifikasi
Jenis Peraturan	Surat Keputusan				
Nomor Peraturan	054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024				
Tahun Peraturan	2024				
Judul Peraturan	Surat keputusan tentang tim pengelola anggota jaringan dokumenta				
Tanggal Ditetapkan	01 Juni 2024				
Tanggal Diundangkan					
Sumber	Bawaslu Kabupaten Semarang				
Tempat Terbit	Ungaran				
Bidang Hukum	Hukum Umum				
Bahasa	Indonesia				
Lokasi	Bawaslu Kabupaten Semarang				
Urusan Pemerintahan	Bidang Kearsipan				
Penandatanganan	Agus Riyanto				
Pemrakarsa					
Status	Berlaku				
File Dokumen					

d. Pelatihan atau Peningkatan Kapasitas Pengelola JDIH.

Pada tahun 2024, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang belum pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas pengelolaan JDIH yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun pada tahun 2023, tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang pernah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu dalam menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024 Gelombang II di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta pada hari Kamis, 2 November 2023. Kegiatan tersebut juga disertai

dengan praktik langsung teknik penulisan abstrak secara benar oleh tenaga ahli Bawaslu RI dan juga hasilnya *direview* secara detail agar dapat mengoptimalkan upaya pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Semarang sekaligus mempersiapkan mengikuti penilaian penganugerahan JDIH terbaik (JDIH Bawaslu Awards).

TEKNIS PENGELOLAAN

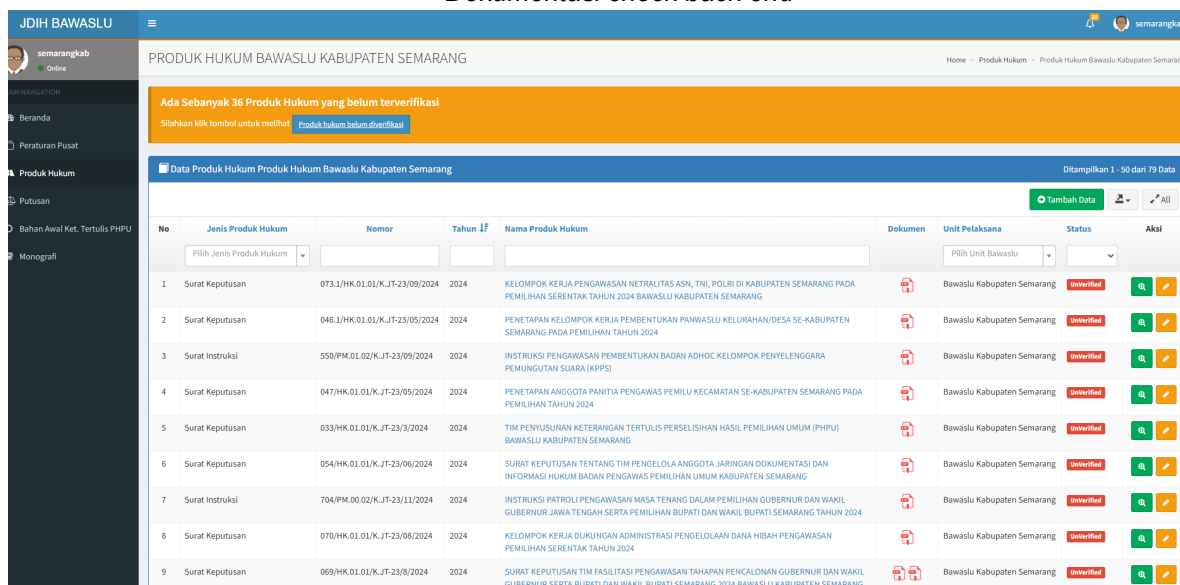
a. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum

Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu selalu berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang.

Dasar penginputan dokumen hukum yaitu ada di pasal 4 Perbawaslu 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum yaitu:

1. Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
2. Putusan Penyelesaian Sengketa;
3. Surat Keputusan;
4. Surat Edaran;
5. Nota Kesepahaman;
6. Perjanjian Kerja Sama;
7. Kajian Hukum; dan
8. Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Dokumentasi check back end

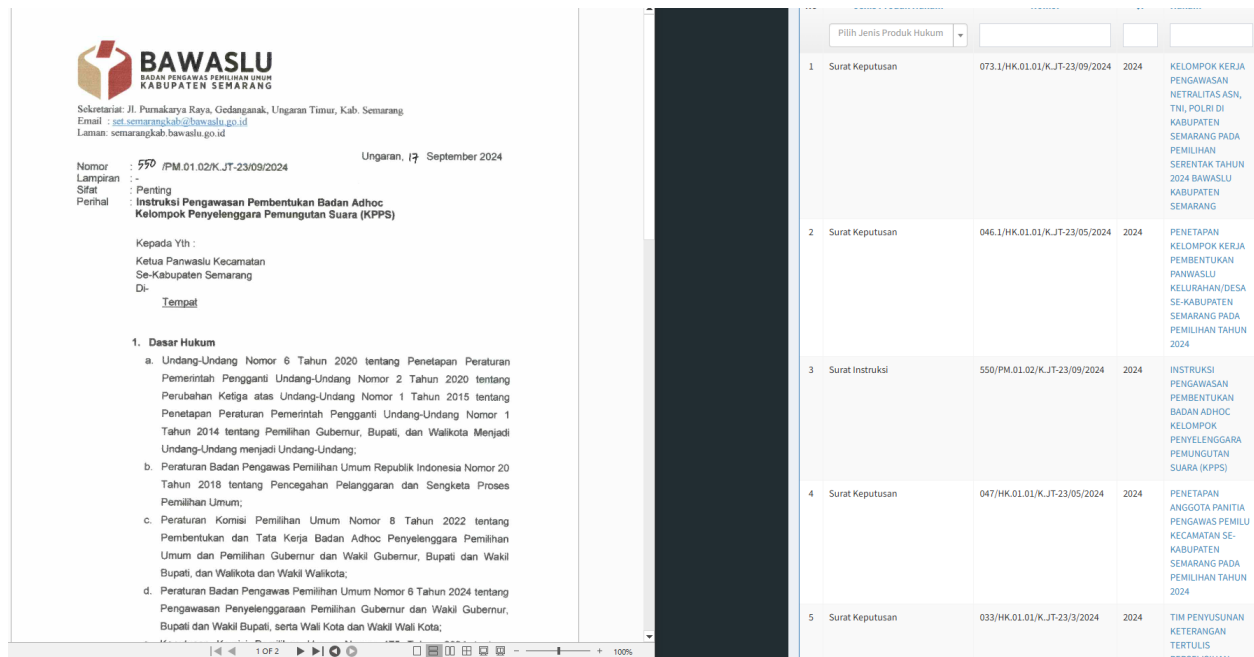


The screenshot displays the 'PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG' interface. It features a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'Peraturan Pusat', 'Produk Hukum', 'Putusan', 'Bahan Awal Ket. Tertulis PPHU', and 'Monografi'. The main content area shows a table of legal products with columns for 'No', 'Jenis Produk Hukum', 'Nomor', 'Tahun', 'Nama Produk Hukum', 'Dokumen', 'Unit Pelaksana', 'Status', and 'Aksi'. A notification banner at the top indicates that 36 products have not been verified. The table lists 9 items, all with a status of 'Unverified'.

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Status	Aksi
1	Surat Keputusan	073.1/HK.01.01/K.JT-23/09/2024	2024	KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, POLRI DI KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
2	Surat Keputusan	046.1/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
3	Surat Instruksi	550/PM.01.02/K.JT-23/09/2024	2024	INSTRUKSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
4	Surat Keputusan	047/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
5	Surat Keputusan	033/HK.01.01/K.JT-23/3/2024	2024	TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
6	Surat Keputusan	054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024	2024	SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
7	Surat Instruksi	704/PM.00.02/K.JT-23/11/2024	2024	INSTRUKSI PATROLI PENGAWASAN MASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
8	Surat Keputusan	070/HK.01.01/K.JT-23/08/2024	2024	KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	
9	Surat Keputusan	069/HK.01.01/K.JT-23/8/2024	2024	SURAT KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified	

b. Kesesuaian Dokumen yang Diunggah

Anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang memastikan dalam melaksanakan penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu sesuai dengan dokumen fisik yang ada di Bawaslu Kabupaten Semarang.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Sekretariat: Jl. Pemakarya Raya, Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang
Email: pet.semarangkab@bawaslu.go.id
Laman: semarangkab.bawaslu.go.id

Ungaran, 17 September 2024

Nomor : 550 /PM.01.02/K-JT-23/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Instruksi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Kepada Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Semarang
Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Pilih Jenis Produk Hukum			
1	Surat Keputusan	073.1/HK.01.01/K-JT-23/09/2024	2024
2	Surat Keputusan	046.1/HK.01.01/K-JT-23/05/2024	2024
3	Surat Instruksi	550/PM.01.02/K-JT-23/09/2024	2024
4	Surat Keputusan	047/HK.01.01/K-JT-23/05/2024	2024
5	Surat Keputusan	033/HK.01.01/K-JT-23/3/2024	2024

Dokumentasi kesesuaian dokumen yang diunggah serta pastikan asli dan sudag dicap

c. Tata Cara Pengunggahan Dokumen Hukum

Anggota pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melaksanakan tugas penginputan Dokumen Hukum dan Informasi ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sekaligus berkoordinasi dengan tim pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang.

Pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dalam melakukan pengunggahan dokumen hukum telah sesuai dengan SOP JDIH Bawaslu. Dalam proses pengunggahannya ada beberapa hal yang diperhatikan diantaranya:

1. Penulisan judul dokumen hukum
2. Penulisan nomor dokumen hukum
3. Input relasi
4. Ketelitian dalam penulisan abstrak
5. Kesesuaian dokumen yang diunggah

Dokumentasi check back end, unggahan dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang

PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG									
Ada Sebanyak 36 Produk Hukum yang belum terverifikasi									
Stahikan klik tombol untuk melihat produk hukum yang belum terverifikasi									
Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang									
No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Status	Aksi	
1	Surat Keputusan	073.1/HK.01.01/K.JT-23/09/2024	2024	KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASAL, TIM, POLRI DI KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
2	Surat Keputusan	046.1/HK.01.01/K.JT-23/09/2024	2024	PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
3	Surat Instruksi	550/PM.01.02/K.JT-23/09/2024	2024	INSTRUKSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
4	Surat Keputusan	047/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
5	Surat Keputusan	033/HK.01.01/K.JT-23/3/2024	2024	TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PESELISHPHAK HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
6	Surat Keputusan	054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024	2024	SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
7	Surat Instruksi	704/PM.00.02/K.JT-23/11/2024	2024	INSTRUKSI PATROLI PENGAWASAN HASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
8	Surat Keputusan	070/HK.01.01/K.JT-23/08/2024	2024	KELOMPOK KERJA DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DANA HIBAH PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
9	Surat Keputusan	069/HK.01.01/K.JT-23/8/2024	2024	SURAT KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
10	Surat Instruksi	403/PM.00.02/K.JT-23/07/2024	2024	INSTRUKSI PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
11	Surat Keputusan	048.1/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	TIM PENUSUN BUKU PENGAWAS PEMILU ADHOC PEMILU 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		

d. Abstrak pada Produk Hukum yang diunggah

Produk Hukum yang diunggah Bawaslu Kabupaten Semarang diantaranya Surat Keputusan, surat Instruksi Putusan, Nota Kesepahaman. Dari kesemua produk hokum yang diunggah tersebut, hanya produk Putusan yang memiliki Abstrak:

PENANGANAN PELANGGARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PUTUSAN NOMOR : 227/PHD.Su/2018/PM/Um 19 NOPEMBER 2018, 113 HLM
PUTUSAN PENGAWASAN PASAL 521 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM JO PASAL 55 AYAT (1) KE 1 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

ABSTRAK : Penanganan dugaan pelanggaran pidana Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terjadi di Dusun Kalkembar Desa Pakopem Kecamatan Bandungan yang melibatkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd binti H. MUZAZIN, serta SARWONO, S.Pd bin AHMAD SAHRI pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 04.45 WIB, adalah sebagai pelaksanaan kampanye pemilu dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung, pada saat kegiatan Merti Dusun Kalkembar Desa Pakopem Kecamatan Bandungan. Ada peristiwa pelaksanaan kampanye dua orang tersebut diatas memberikan sejumlah uang dimasukkan dalam dua amplop diberikan kepada JARWOTO, JARWOTO menyerahkan ke dua amplop kepada HADI SUBROTO, dari amplop SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan SARWONO, S.Pd senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan uraian peristiwa diatas Penuntut Umum TETAP PADA SURAT TUNTUTAN No.Reg. Perkara : PM/92/0.3.42/Fp.2/10/2009 tanggal 15 November 2018 yang amar sebagai berikut agar menyatakan Terdakwa I Siti Ambar Fathonah,S.Pd binti H.Muzazin dan Terdakwa II Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu : "tersebut Pelaksana Kampanye Pemilu Dengan Sengaja Menjanjikan atau Memberikan uang atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana diatur dalam Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 43/HK.03.14p/03/Prov/J/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah IKOK PURNOMO menetapkan SITI AMBAR FATHONAH, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum pada Halaman 1 dalam Daftar Calon Tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah – 2 (dua).

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 78/PLD.01.4p/03/2/KPU/KAB/04/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 September 2018 yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang GUNTUR SUKAWAN menetapkan SARWONO, S.Pd sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Semarang 5 (lima).

PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SEMARANG									
Data Produk Hukum Putusan Bawaslu Kabupaten Semarang									
Ditampilkan 1 - 2 dari 2 Data									
No	Jenis Putusan	Nomor	Tahun	Judul Putusan	Dokumen	Unit Pelaksana			
1	Putusan Pidana Pemilu	227/PHD.Su/2018/PM/Um	2018	PUTUSAN PENGADILAN NEGARA UNGARAN PIDANA POLITIK UANG PEMILU OLEH SITI AMBAR FATHONAH DAN SARWONO		Bawaslu Kabupaten Sem			
2	Putusan Pidana Pemilu	342/PHD.Su/2018/PT SMG	2018	PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH TENTANG PIDANA POLITIK UANG OLEH SITI AMBAR FATHONAH DAN SARWONO		Bawaslu Kabupaten Sem			

Dokumen hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang memiliki abstrak pada JDIH

SARANA PRASARANA

a. Ruang Khusus JDIH

Bawaslu Kabupaten Semarang secara khusus belum memiliki ruangan JDIH, akan tetapi memiliki ruangan pelayanan terpadu yang bisa digunakan untuk JDIH dan juga memiliki pojok pengawasan yang terdapat rak/tempat untuk menyimpan buku dan produk hukum.



Dokumentasi ruang layanan terpadu Bawaslu Kabupaten Semarang

b. Ruang kerja JDIH

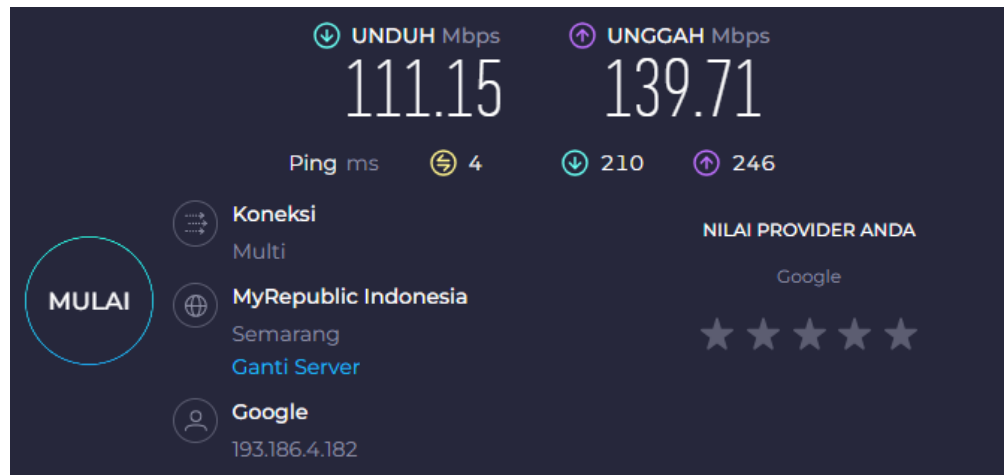
pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang juga memiliki ruang kerja untuk memudahkan dalam proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum. Diruang tersebut tersedia 1 unit PC. Untuk scanner dan printer juga tersedia yang fungsi kegunaannya dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.



Gambar Meja kerja operator JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang

c. Jaringan Internet

Penunjang Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang dilengkapi dengan jaringan internet dengan provider My Republik dengan kecepatan 150 Mbps.



Tangkapan layar uji kecepatan internet yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Semarang dalam mendukung pengelolaan JDIH Bawaslu

PENGUATAN ORGANISASI DAN KERJASAMA

1. Melaksanakan Pelatihan Pengelolaan JDIH Bawaslu

Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan rapat layanan Hukum yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Ambarawa yang dihadiri oleh Seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Semarang.



Dokumentasi kegiatan rapat layanan Hukum

2. Melakukan Study Banding antar anggota JDIHN instansi daerah dalam rangka penguatan SDM

Selama tahun 2024, JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang belum melaksanakan study banding secara langsung ke JDIH Daerah.

3. Melakukan konsultasi dokumentasi Hukum ke Pusat JDIH Bawaslu

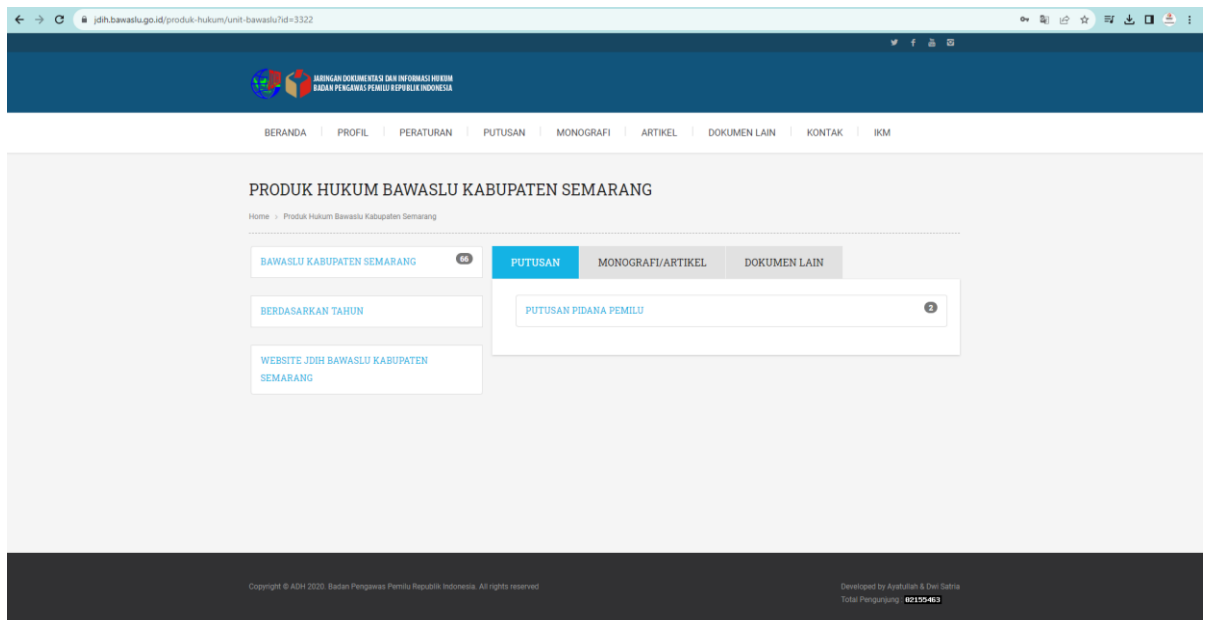
Selama periode Tahun 2024 JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang tidak melakukan konsultasi ke JDIH Bawaslu RI.

DOKUMENTASI HUKUM

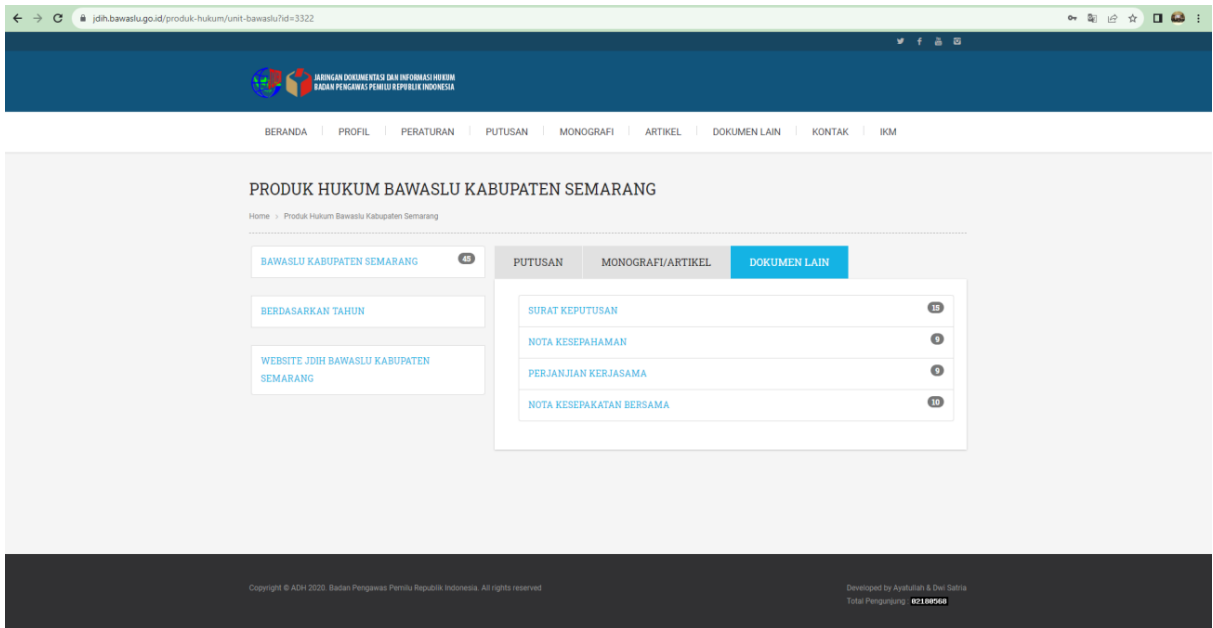
Dokumen hukum yang dimiliki JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang sejak tahun 2018 berupa putusan pidana Pemilu, Surat Keputusan, Perjanjian kerjasama, nota kesepemahaman, dan surat instruksi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang

No	Nama Dokumen	Jumlah
1	Surat Keputusan	54
2	putusan pidana Pemilu	2
3	Perjanjian kerjasama	9
4	Nota kesepemahaman	19
5	Surat Instruksi	4
Total		88

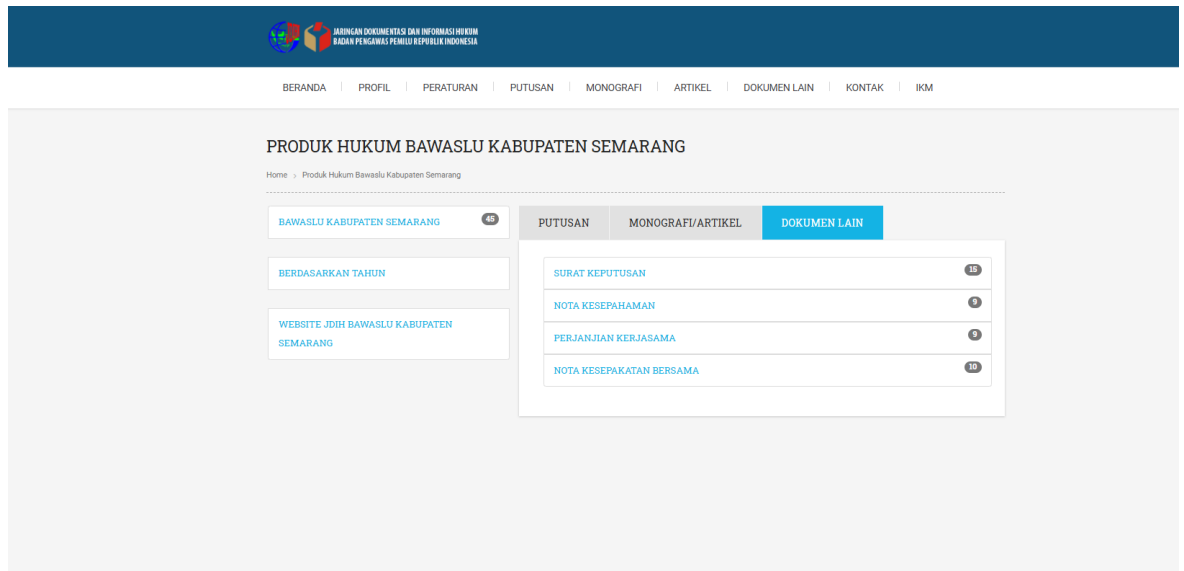


*Tangkapan layar JDIH
Bawaslu
Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Putusan Pidana
Pemilu*



*Tangkapan layar JDIH Bawaslu
Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang Surat Keputusan, Nota Kesepahaman, Perjanjian
Kerjasama, Surat Instruksi dan Nota Kesepakatan Bersama*

JDIH Bawaslu Kabupaten Semarang melakukan update Produk Hukum dari tahun ke tahun. Produk pertama yang telah diunggah ke JDIH Bawaslu yaitu dari tahun 2018 sejumlah 2 (dua) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang, tahun 2021 sejumlah 29 (dua puluh sembilan) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang, tahun 2022 sejumlah 11 (sebelas) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang, tahun 2023 sejumlah 3 (tiga) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang dan tahun 2024 sejumlah 13 (tiga belas) Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang. sehingga dari tahun 2018 sampai dengan 2024 terdapat 45 Produk Hukum yang telah diverifikasi. Namun masih terdapat 36 Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Produk hukum yang diunggah sebagaimana tangkapan layar JDIH Bawaslu di bawah ini :



Tangkapan Layar produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang telah terverifikasi

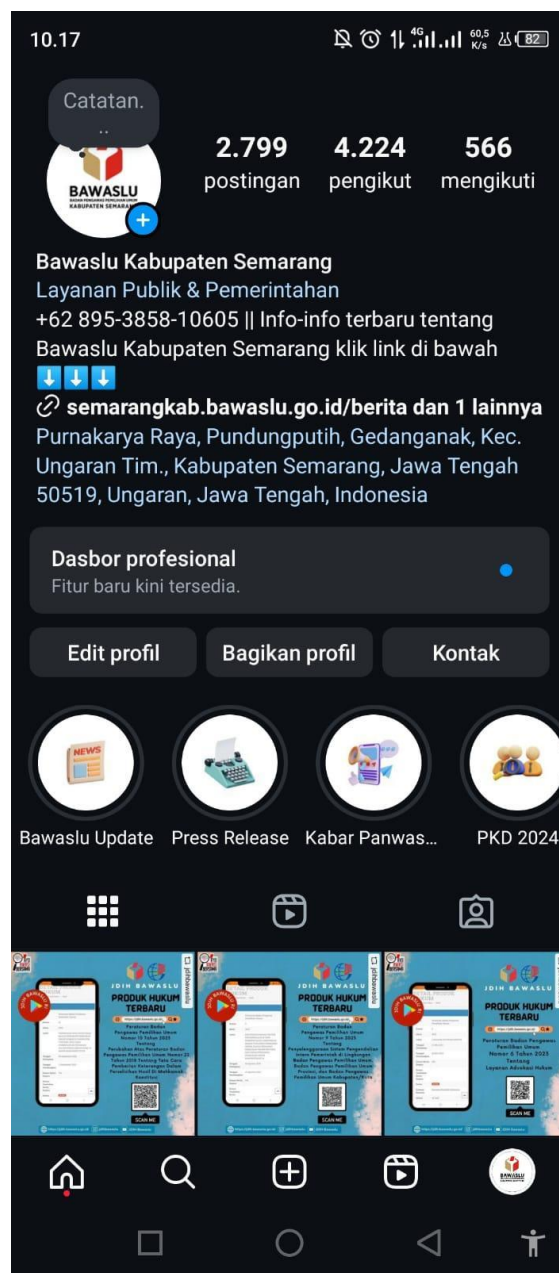
PRODUK HUKUM BAWASLU KABUPATEN SEMARANG									
Ada Sebanyak 36 Produk Hukum yang belum terverifikasi Silahkan klik tombol untuk melihat Produk hukum belum diverifikasi									
Data Produk Hukum Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang									
No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tahun	Nama Produk Hukum	Dokumen	Unit Pelaksana	Status	Aksi	
	Pilih Jenis Produk Hukum					Pilih Unit Bawaslu			
1	Surat Keputusan	073.1/HK.01.01/K.JT-23/09/2024	2024	KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASDA, TPA, POLRI DI KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN SERIKATTAH TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
2	Surat Keputusan	046.1/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA SE KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
3	Surat Instruksi	550/PM.01.02/K.JT-23/09/2024	2024	INSTRUKSI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
4	Surat Keputusan	047/HK.01.01/K.JT-23/05/2024	2024	PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN SEMARANG PADA PEMILIHAN TAHUN 2024		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
5	Surat Keputusan	033/HK.01.01/K.JT-23/3/2024	2024	TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS PERSELESIAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
6	Surat Keputusan	054/HK.01.01/K.JT-23/06/2024	2024	SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JABINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		
7	Surat Instruksi	704/PM.01.02/K.JT-23/11/2024	2024	INSTRUKSI PETROLI PENGAWASAN MASA TENANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA		Bawaslu Kabupaten Semarang	Unverified		

Tangkapan layar JDIH Bawaslu Produk Hukum Bawaslu Kabupaten Semarang yang belum dilakukan verifikasi

SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU

Pemanfaatan Media Sosial oleh Bawaslu Kabupaten Semarang merupakan salah satu inovasi dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan media sosial ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan lebih luas terutama penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Media Sosial seperti *Instagram* Bawaslu Kabupaten Semarang.

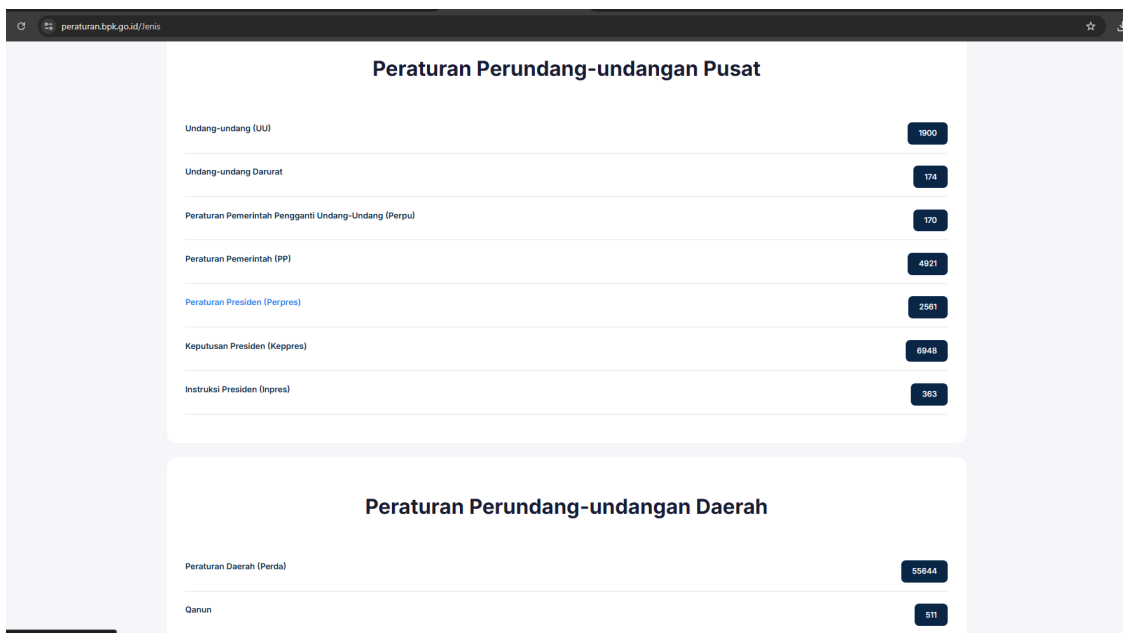
Dokumentasi Sosialisasi dan Promosi JDIH



SARAN DAN MASUKAN

1. Saran dan Masukan terhadap pengelolaan dokumen dan informasi Hukum Bawaslu
 - a. Saran terhadap pengelolaan JDIH khususnya bagi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait dengan verifikator produk hukum, verifikator dilakukan oleh ketua tim pengelola JDIH pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mempercepat proses Publikasi produk Hukum.
 - b. Pusat JDIH Bawaslu diharapkan dapat memberikan penguatan kapasitas bagi tim pengelola JDIH Bawaslu di masing-masing satuan kerja.
 - c. Dokumen hukum Bawaslu RI seperti, Surat Keputusan ataupun Surat Edaran yang berkaitan dengan pengawasan tahapan terkadang sulit untuk dicari dalam JDIH, sehingga harapannya kedepan dokumen hukum tersebut dapat di lebih intens di upload di JDIH.
2. Saran dan Masukan terhadap Sistem JDIH Bawaslu

Terhadap sistem JDIH Bawaslu saat ini sudah makin baik namun akan lebih baik jika JDIH Bawaslu memiliki sistem database peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran, Pencegahan maupun penyelesaian sengketa proses. Berikut contoh sistem database peraturan yang di miliki oleh BPK RI.



Peraturan Perundang-undangan Pusat	
Undang-undang (UU)	1900
Undang-undang Darurat	174
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)	170
Peraturan Pemerintah (PP)	4921
Peraturan Presiden (Perpres)	2561
Keputusan Presiden (Keppres)	8945
Instruksi Presiden (Inpres)	363

Peraturan Perundang-undangan Daerah	
Peraturan Daerah (Perda)	55044
Qanun	511



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM